



**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP FUNGSI
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

TUTI LESTARI BR SITEPU

NPM: 1415100069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TUTI LESTARI BR SITEPU
NPM : 1415100069
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1(STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Langkat)

MEDAN, JULI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN

(ANGGI PRATAMA NST, SE., M.Si) (Dr. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Drs. ABDUL HASYIM BB, AK., MM) (NINA AMDRIANY NST, SE., AK., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : TUTI LESTARI BR SITEPU
NPM : 1415100069
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Langkat)

MEDAN, JULI 2019

KETUA



(ANGGI PRACAMA NST, SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(NINA ANDRIANY, SE., AK., M.Si)

ANGGOTA - I

(Drs. ABDUL HASYIM BB, AK., MM)

ANGGOTA - III

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

ANGGOTA - IV

(OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, SE.,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : TUTI LESTARI BR SITEPU
NPM : 1415100069
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2019



(Tuti Lestari Br Sitepu)
NPM: 1415100069

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : TUTI LESTARI BR SITEPU
Tempat/ Tanggal Lahir : Binjai/ 27 Desember 1995
NPM : 1415100069
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Kuini No.17 Binjai Barat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Mei 2019

METERAI
TEMPEL
Rp5250
6000
DINAS PERKULIAHAN

(Tuti Lestari Br Sitepu)
NPM: 1415100069



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lengkap

2. Tgl. Lahir

3. Pokok Mahasiswa

4. Program Studi

5. Konsentrasi

6. Jumlah Kredit yang telah dicapai

7. Judul skripsi ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

: TUTI LESTARI BR. SITEPU
: Binjai / 27 Desember 1995
: 1415100069
: Akuntansi
: Akuntansi Sektor Publik
: 127 SKS, IPK 3.24

Judul Skripsi	Persetujuan
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan PDAM TIRTASARI Kota Binjai	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Langkat)	<input checked="" type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Februari 2018

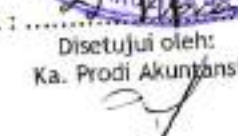

(TUTI LESTARI BR. SITEPU)

Nomor :
Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

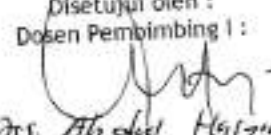

(Dr. Surya Wita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi


(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

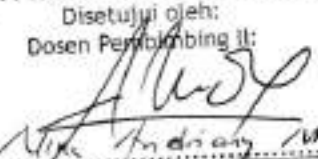
Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :


(RDS: Abdol Halim, S.Pd, M.Pd)

Tanggal : 8-6-2018

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:


(Nings Indriany, S.Pd, SE, M.Pd)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 05 Februari 2018 09:08:25

No. 186/Perp/An/2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Tgl: Permohonan Meja Hijau

Medan, 06 Juli 2019
 Kepada Yth: Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUTI LESTARI BR SITEPU
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 27 Desember 1995
 Nama Orang Tua : DESMON SITEPU
 N. P. M : 1415100069
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082165010134
 Alamat : Binjai Kota

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat). Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas joruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650.000
2. [170] Administrasi Wtsude	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.250.000
5. UK Termin 50% dr 1 thn	Py	2.500.000
		4.750.000

My 8/7 08

Ukuran Toga : S



Hormat saya
 Tuti Lestari Br Sitepu
 1415100069

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (Tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Abdul Hasyim BB., AK., MM
 Pembimbing II : Nina Andriany Nasution, SE., AK, M.Si
 Mahasiswa : TUTI LESTARI BR. SITEPU
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1415100069
 Pendidikan : S1
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh sistem pengelompokan keuangan daerah dan Implementasi Akuntansi keuangan daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Langkat

WISMA	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21-19 4	Revisi 1/2019		
21-19 7	Revisi		
21-19 4	Revisi		
21-19 4	Revisi		

Medan, 27 Maret 2019

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

0822 7672 5498

Universitas
 Fakultas
 Pembimbing I
 Pembimbing II
 Mahasiswa
 Program Studi
 Pokok Mahasiswa
 Pendidikan
 Tugas Akhir/Skripsi

: Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 : Drs. Abdul Hasyim BB., Ak., M.Si
 : Nina Andriany, SE., Ak., M.Si
 : TUTI LESTARI BR. SITEPU
 : Akuntansi
 : 1415100069
 : S1

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan daerah dan Implementasi
 Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan
 Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Langkat

NO	PENBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	① - BUAT DAFTAR LAMPIRAN - SEWISAH TABEL DAN CATIBAN JADWAL LAMPIRAN - BUAT BIODATA - BUAT TANGKIL NAWAAN LAR ~ DATA QUESTIONER DATA CAPORAN KEUNGGAN DAERAH ~ IMPLEMENTASI KONTROL KEUNGGAN DAERAH ② PERUBAH LAGI DENGAN BATA ③ BERKAS YG SALAH TANGJURAN FEMBAU.		
15-2019	① BUAT DAFTAR LAMPIRAN ② PERUBAH YG DIPAT BAJA ③ BERKAS YG SALAH TANGJURAN FEMBAU		

Medan, 29 April 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (081) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

0822 7672 5498

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Kelas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim Bb., Ak., M.si
 Pembimbing II : Nina Andriany., SE., Ak., M.si
 Mahasiswa : TUTI LESTARI BR. SITEPU
 Jenis/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100069
 Bidang Pendidikan : S1
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah Pada BPEAD Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
16-06-2019	- 40 UENBAN - PERBAHAI LAPORAN DEW BAK - BERKAS 70 HALAM TUNJUKAN PERBAHAI.		
16-06-2019	- 30 UENBAN - PERBAHAI LAPORAN DEW BAK - BERKAS 70 HALAM PERBAHAI.		
16-06-2019	ACE FIDANSE MEGA HIJAU		

Medan, 12 Juni 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM
 Dosen Pembimbing II : Nina Andriyani Nst SE, Msi
 Nama Mahasiswa : TUTI LESTARI BR. SITEPU
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100069
 Bidang Pendidikan : SI
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di BPKD Kabupaten Langkat.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/8-16	Perbaikan 2x Survei dasar	ab	
1/8-16	Perbaikan	ab	
2/8-18	Perbaikan	ab	
1/8-18	Perbaikan	ab	

Medan, 09 Juli 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas
 Fakultas
 Pembimbing I
 Pembimbing II
 Mahasiswa
 Program Studi
 Pokok Mahasiswa
 Pendidikan
 Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 : Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM
 : Nina Andriyani Nst SE., Msi
 : TUTI LESTARI BR. SITEPU
 : Akuntansi
 : 1415100069
 : SI

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
 Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap
 Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah Pada ~~BPKD~~ BPKD Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2-2-2018	1) MULAI PERLENGKAPAN RUMAH : 4 CM KANTIN, AIR, BAWAH : 4 CM BAB 48 SUB BAB : 4 SPAN SUB BAB KE SUB BAB : 3 SPAN ANTAH KALUPAS : 2 SPAN -- 2) PUTIPAN TIDAK BOLEH DALAM PUTIPAN : KUSTIPAN MIN. TAWAN 3) SINGGATIN HARUS DIPAJANGKAN DUN KETINDIAN ATAU DUBIRGAT BERLARU PADA BATU HALATAN 4) PERBAIKI LAZI DAN BAKU 5) BERFAH YC SALAH NAJWARAN KEMBAL --		

Medan, 27 Agustus 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

822 7672 5498.

FM-BPAA-2012-038



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas
Fakultas
Pembimbing I
Pembimbing II
Mahasiswa
Program Studi
Pokok Mahasiswa
Pendidikan
Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panca Budi
SOSIAL SAINS
Drs. Abdul Hasyim BB, AK, MM
Nina Andriyani Nst, SE, Msi
TUTI LESTARI BR, SITEPU
Akuntansi
1415100069
SI
Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasi
Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan
Keuangan Daerah Pada BKD Kabupaten Langkat.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19-9-2010	① PERBAIKI LAGI DAN BANK ② REKAS YG SALAH TUNJUKAN PERUBAH	} }	Alusy
5-10-2010	① PERBAIKI LAGI DAN BANK ③ REKAS YG SALAH TUNJUKAN PERUBAH	} }	Alusy
23-10-2010	① PERBAIKI 2 LETBAR ACE SEMINAR PROPOSAL.	}	Alusy

Medan, 04 September 2018
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nisa, SH, M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 06/07/2019 12:19:38

"TUTI LESTARI BR SITEPU_1415100069_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 66	wrds: 7401	http://repository.umrah.ac.id/608/1/JURNAL.pdf
% 29	wrds: 3983	https://rabiy.net.blogspot.com/2015/08/proposal-penelitian.html
% 28	wrds: 3851	https://docobook.com/unduh-file-pdf-inid8b3101238b6a63a8922aa8d3901a69b10460.html

Show other Sources:]

Processed resources details:

214 - Ok / 34 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia: 	Google Books: 	Ghostwriting services: 	Anti-cheating:
Not detected!	Not detected!	Not detected!	Not detected!

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat. Sampel dalam penelitian ini adalah 45 orang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diolah dengan menggunakan SPSS Versi 23.0 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah, implementasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah, Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah.

ABSTRACT

This study examines the effect of the regional financial management system and the implementasi of regional financial accounting on the function of regional financial supervision in the regional Financial and asset management Agency in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat. The sample in this study were 45 people. In this study using a quantitative research approach, the data type used in this study is primary data. Data is processed using SPSS Version 23.0. The result showed that the influence of the regional financial management system had a significant effect on the function of regional financial supervision, the implementation of regional financial accounting had a significant effect on the function of regional financial supervision.

Keyword: *Regional Financial Management, Regional Financial Accounting Implementation, Regional Financial Supervision Function.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat)”**. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, AK., MM selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Nina Andriany Nasution SE., AK., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta dan amat tersayang serta yang paling penulis hormati orang tua saya Ayahanda Desmon Sitepu dan Ibunda Sumiati dengan seluruh kasih

sayang, do'a dukungan, dorongan serta memotivasi yang tiada henti kepada penulis semoga anakmu ini bisa membuatmu bangga dan bisa membuatmu selalu tersenyum atas keberhasilan anakmu ini, Aamiin Yaa Allah.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademis yang ada di lingkungan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada Abang Arif Hardianto Sitepu, dan Adik Sri Rahayu Fitriani Br Sitepu yang saya cintai.
9. Yang berusaha untuk selalu ada Ridhohan Oloan Syahputra Harahap.
10. Kepada sahabat-sahabatku Siti Chairiyah Elfridaini, Suci Mawardani, Desy Zuliya Reza dan Febry Anggraini. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juli 2019
Penulis

Tuti Lestari Br Sitepu
NPM: 1415100069

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
2. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
3. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah	16
4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	18
5. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	18
6. Sumber-Sumber Keuangan Daerah.....	20
7. Pengertian Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah ...	21
8. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	23
9. Sistem Pencatatan.....	24
10. Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Dalam Akuntansi	26
11. Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah	28
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Konseptual	37
D. Hipotesis	38

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	40
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
	C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	41
	D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	42
	E. Teknik Pengumpulan Data	44
	F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	50
	1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50
	2. Visi dan Misi	51
	3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas	52
	4. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat	55
	5. Uji Kualitas Data	56
	6. Uji Asumsi Klasik	59
	7. Analisis Regresi Linier Berganda.....	64
	8. Uji Kesesuaian.....	66
	9. Analisis Koefisien Determinasi.....	70
	B. Pembahasan.....	71
	1. Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah	71
	2. Pengaruh Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah	72
	3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Kuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah	73
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	<i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu 35
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 39
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel..... 42
Tabel 4.1	Uji Validitas Data Variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) 54
Tabel 4.2	Uji Validitas Variabel Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2) 54
Tabel 4.3	Uji Validitas Variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y) 55
Tabel 4.4	Uji Reliabilitas 56
Tabel 4.5	Uji Normalitas 58
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas 59
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi Berganda 61
Tabel 4.8	Uji T 62
Tabel 4.9	Uji F..... 64
Tabel 4.10	Uji Hipotesis 65
Tabel 4.11	Uji Koefisien Determinasi..... 66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan	
Entitas Pelaporan	27
Gambar 2.2	
Kerangka Konseptual	38
Gambar 4.5	
Hasil Pengujian Normalitas	57
Gambar 4.6	
P-P Plot Uji Normal	58
Gambar 4.7	
Uji Heteroskedastisitas	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Pengujian SPSS
2. Kuesioner Penelitian
3. Tabulasi Data
4. Wawancara
5. Laporan Keuangan Daerah
6. Data Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah
7. Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah salah satu bagian penting dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat diharapkan hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini telah menjadi harapan bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat itu sendiri. Menurut Wahyundari (2012: 1) menyatakan, “Pemerintah daerah harus mampu dalam menyediakan informasi keuangan daerah yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga sistem informasi yang ada harus memiliki sistem informasi yang andal dan dapat dipercaya”. Investasi merupakan salah satu jalan dalam memantapkan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bentuk wujud dari harapan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan *good public governance*, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal ini unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam operasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah

Dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak megkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik.

Menurut Halim (2012: 2) menyatakan, “Perubahan salah satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah”. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik.

Menurut Suwardjono (2012: 2), menyatakan “ Akuntansi memiliki peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi apabila informasi yang dihasilkan dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan untuk bertindak menuju kesuatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara”. Salah satu tujuannya adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien sehingga sumber daya

ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

Menurut Tausikal (2009: 26) menyatakan, secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah:

1. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi dalam pemerintahan.
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi dalam pemerintahan.

Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Newkirk (2012: 3) menyatakan, “Dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah, salah satunya adalah tentang akuntansi”. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pemerintah daerah sudah harus menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mulai tahun 2003. Keputusan ini diperkuat dengan keluarnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 yang memuat perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk menerapkan system system ini diperlukan tenaga staf keuangan yang mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan mampu menyusun format laporan keuangan yang baru seperti sesuai yang diharapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Namun, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bisa saja mengalami

hambatan dan kendala akibat ketidaksesuaian penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) oleh aparat pemerintah daerah.

Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Karena akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah memiliki fungsi menghasilkan *output* yang berupa laporan keuangan yang nantinya akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah (*stakeholder* pemerintah daerah). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat adalah suatu badan yang memiliki tugas pokok mengelola keuangan dan sebagai pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat telah menyusun Laporan Keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Namun dalam hal penyusunan laporan keuangan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat belum sepenuhnya memahami sistem akuntansi yang

sekarang berlaku yaitu basis kas menuju akrual. Basis kas menuju akrual yang saat ini diterapkan belum semua dipahami oleh masing-masing entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, sudah harus diberlakukannya basis yang baru dalam tahun 2015 yaitu basis akrual, menjadi alasan perlunya dilakukan pelatihan tenaga akuntansi. Pelatihan sebaiknya langsung terhadap praktik-praktik yang *real* dilapangan disertai dengan contoh-contoh soal akan tetapi dengan tidak meninggalkan pemahaman teori akuntansi pemerintahan. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) akuntansi ini menjadi modal penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa masih perlunya pemahaman tentang implementasi akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

Selain itu masih terdapat permasalahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat yaitu kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan kurangnya sumber daya yang memadai dalam hal melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah, belum maksimalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan keuangan daerah baik dari aspek ketertiban administrasi maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian masih di bawah harapan dari masyarakat maupun *stakeholder* dalam hal pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk memilih dan membahas masalah pengawasan keuangan daerah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan**

Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Para pegawai instansi pemerintahan belum memahami sepenuhnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
- b. Masih diperlukannya pemahaman tentang implementasi akuntansi keuangan daerah dalam suatu instansi pemerintahan.
- c. Pengawasan keuangan daerah masih dibawah harapan dari masyarakat maupun *stakeholder*.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, maka penulis membatasi masalah agar tetap terfokus pada pokok permasalahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, maka penulis membatasi masalah hanya pada variabel sistem pengelolaan keuangan daerah, implementasi akuntansi keuangan daerah dan fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat?
2. Apakah implementasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat?
3. Apakah fungsi pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.
- b. Menganalisis pengaruh implementasi akuntansi keuangan daerah secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.
- c. Menganalisis fungsi pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis:

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat dalam mencapai fungsi pengawasan keuangan daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nopriansyah Putra (2016) fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Penelitian ini berjudul: Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daereah Kabupaten Langkat). Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Model Penelitian: Dalam penelitian terdahulu menggunakan model moderating. Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.

2. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Akuntabilitas (X_2), Transparansi (X_3) dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kinerja Pemerintah (Y) serta pengawasan sebagai variabel moderating. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dan 1 (satu) variabel terkait yaitu Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y).
3. Jumlah Sampel (n): Penelitian terdahulu menggunakan sampel penelitian sebanyak 68 orang. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 45 orang.
4. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan Tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
5. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Halim (2002: 14) menyatakan, “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Pengelolaan keuangan

daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah:

- 1) Penetapan secara rinci tujuan dan juga sasaran, hasil dan juga manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

b. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *check and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

c. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung-jawaban berupa:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Neraca.

3) Laporan Arus Kas.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

d. Pengawasan

Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan, "Asas-asas pengelolaan keuangan daerah ditetapkan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat".

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah bahwa perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Kabo (2002: 17) menyatakan, “Keadaan keuangan yang stabil adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yang baik”. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegritasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

2. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Soleh dan Heru (2010: 10) menyatakan, Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai syarat bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena lalai.

b. *Value for money*

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi mengalami kemajuan. Adapun kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

- 1) Ketidakhematan. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
- 2) Ketidakefektifan. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yakni temuan yang memaparkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- 3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*). Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah. Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian dimasa yang akan

datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- 4) **Transparansi.** Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan). Tidak menghambat program entitas, dan juga tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- 5) **Pengendalian.** Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan dengan apa yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan antisipasi kedepan.

3. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah

Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah (APBD) didorong oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat suatu daerah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel.
- b. Pemberlakuan undang-undang Pemerintah Daerah dan undang-undang Tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang baru serta peraturan pelaksanaannya..
- c. Sistem, prosedur dan format struktur APBD yang berlaku selama ini dinilai kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif. Perencanaan APBD dengan paradigma baru tersebut adalah:
 - 1) APBD yang berorientasi pada kepentingan publik.
 - 2) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
 - 3) Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan p enganggaran oleh unit kerja.
 - 4) Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan diantara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah dan unit-unit Pengelola Layanan Publik dalam pengembalian kebijakan.

Dalam kegiatan pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Disamping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan pemerataan.

Pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan anggaran daerah, dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun hingga saat ini, kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif rendah. Hal ini dapat dimengerti oleh karena disebabkan masih banyak aparatur daerah untuk mengambil keputusan, sekalipun hal itu berada dalam ranah kekuasaannya. Kebiasaan mohon petunjuk pelaksanaan adalah sesuatu yang sangat lumrah yang menjadi pemandangan keseharian. Akibatnya, proses anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih sentralisasi.

Perencanaan anggaran didominasi dan diintervensi oleh pemerintah pusat dalam rangka mengakomodasikan kepentingan pusat di daerah tersebut. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hanya mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat dan atau pemerintah atasan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran daerah terus meningkat secara dinamis, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*.

Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *under financing* atau *over financing* yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Menurut Chabib dan Heru (2010: 12) menyatakan bahwa, “Analisis Standar Belanja (ASB) dapat digunakan untuk menyusun anggaran daerah dengan menggunakan pendekatan kinerja”.

4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara baik, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun selalu ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti.

- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
- d. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan keuangan daerah adalah:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.
- 2) Keuangan daerah dibentuk bukan hanya semata-mata untuk mengurus masalah keuangan tetapi juga untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Halim (2012: 25) menyatakan bahwa, tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a) Tanggug jawab.
- b) Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
- c) Kejujuran.
- d) Hasil guna dan kegiatan bunga.
- e) Pengendalian.

6. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157, meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil Pajak Daerah.
 - 2) Hasil Retribusi Daerah.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan.
 - 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah.
- b. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil.
 - 2) Dana Alokasi Umum.
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman daerah
 - 1) Pemerintah.
 - 2) Pemerintahan Daerah.
 - 3) Lembaga Keuangan Daerah.
 - 4) Lembaga Bukan Keuangan Bank.
 - 5) Masyarakat.
- d. Lain-Lain Penerimaan Daerah
 - 1) Hibah.
 - 2) Dana Darurat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memiliki sebuah kesimpulan bahwa sumber-sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan hasil daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Menurut Halim dan Damayanti (2012: 26) menyatakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawas yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada.

7. Pengertian Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dari pengertian tersebut, maka implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdiri dari dua dimensi yaitu kemudahan dan kemanfaatan. Kemudahan dan kemanfaatan implementasi sistem akuntansi pemerintahan memungkinkan kebijakan akuntansi diterima disemua pihak yang bersangkutan.

Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purpose financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan sebuah landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

Menurut Hendriksen (2012: 6) menyatakan, “Implementasi sebagai sistem akuntansi pemerintahan diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang

jas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan dimana bisa diperiksa segala transaksi yang terjadi didalam entitas itu, yakni entitas pemerintah. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan”.

Menurut Dunk dan Pepera (2009: 25) menyatakan, “Apabila terdapat sistem akuntansi maka pemeriksaan akuntansi dapat dilakukan secara lebih efektif”. Implementasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aktivitas yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk didalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi pengelolaan keuangan daerah terdiri *planning and budget setting*.

Menurut Halim (2012: 26) menyatakan, “Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses yang terdiri dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi)”.

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah

suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”.

Sedangkan didalam Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa: “Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara manual atau dengan emnggunakan aplikasi komputer”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan sebuah informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

8. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, meliputi:

- a. Pencatatan, didalam sector keuangan melaksanakan pencatatan dengan memanfaatkan system dalam pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan dengan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

- b. Penggolongan dan Pengikhtisaran, didalam penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- c. Pelaporan, setelah seluruh proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak – pihak yang memerlukannya antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan, Investor, Kreditor dan Donator, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

9. Sistem Pencatatan

Akuntansi adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat aktivitas berupa proses pengidentifikasian, pencatatan transaksi, pengukuran serta pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat memebedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang bukan. Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian

demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Halim (2012: 29) menyatakan bahwa, ada beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

a. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

b. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (*double* = berpasangan/ganda, *entry*=pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada disebelah kiri sedangkan sisi kredit ada disebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Bentuk dari persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan}$$

Segala suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva/harta akan dicatat dalam sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva/harta akan

dicatat dalam sisi kredit. Hal yang sama juga dilakukan untuk belanja. Hal ini sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal yang serupa juga dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau badan/biro pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

10. Kedudukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di dalam Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan sehingga akuntansi memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan pokok bahasan yang dikaji. Apabila pokok bahasan yang dikaji adalah entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik atau terbagi menjadi akuntansi komersial, akuntansi pemerintahan (sektor publik) dan sosial.

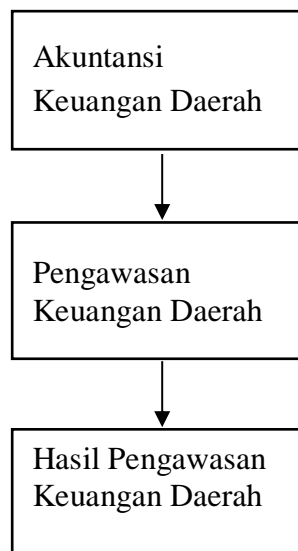
Dilain pihak apabila pokok bahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Didalam sistematika ilmu akuntansi, dalam klasifikasi pertama kedudukan akuntansi keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan dalam klasifikasi kedua,

akuntansi keuangan daerah tergolong dalam akuntansi keuangan . Dalam akuntansi pemerintahan (sektor publik) data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah (sektor publik) kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

Menurut Halim (2012: 33), menyatakan bahwa lingkup akuntansi pemerintahan (sektor publik).

- a. Akuntansi Pemerintah Pusat.
- b. Akuntansi Pemerintahan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Akuntansi Pemerintah Provinsi..
 - 2) Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan klasifikasi diatas, kedudukan akuntansi keuangan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam akuntansi dapat ditunjukkan seperti gambar berikut:



Gambar 2.1 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Entitas Pelapor

Sumber: Halim, (2012: 33)

11. Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hal ini juga diatur pada undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai berbagai tugas dan wewenang dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*,

pengawasan juga diperlukan untuk mendukung pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik seperti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan juga efisien.

Menurut Arfianti (2011: 29) menyatakan, “Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut”.

Menurut Rohmant (2009: 25) menyatakan, ” Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen/bebas terhadap obyek yang diawasi”.

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen/bebas terhadap suatu obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Susmanto (2017: 29) menyatakan, “Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan internal dan juga eksternal merupakan dua badan yang berbeda, namun keduanya juga ikut dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk itu badan pengawas internal atau juga pejabat pengawas pemerintah adalah orang yang jabatannya melaksanakan tugas pengawas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat daerah terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Inspektorat wilayah Provinsi adalah instansi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah Provinsi. Instansi ini bertanggungjawab kepada Gubernur. Instansi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan umum atas aktivitas Pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negeri Provinsi.

- b. Inspektorat wilayah Kabupaten atau Kotamadya adalah instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah, termasuk Kecamatan.

Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pengawasan. Fungsi pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan fungsi pengawasan intern yaitu suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan berkaitan dengan keuangan daerah.

Dimensi variabel fungsi pemeriksaan keuangan daerah, hal ini meliputi antara lain:

- 1) Pengkajian sistem akuntansi dan pengendalian intern.
- 2) Pengujian atas pengelolaan informasi keuangan dan operasi pemerintah.
- 3) Pengujian terhadap instrumen untuk menjaga harta, prosedur pemeriksaan yang tepat, standar operasional, dan identifikasi keadaan yang tidak efisien.
- 4) Pengujian terhadap pengendalian nonfinansial organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017: 31) menyatakan, “Tidak sampai pada tahap evaluasi saja, pengawasan juga sangat diperlukan pada setiap tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah”. Menurut Alamsyah (2017: 31) menyatakan, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penting dilakukan untuk memastikan bahwa:

- a) Alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b) Menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif.
- c) Menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim (2012: 39) menyatakan, jenis-jenis pengawasan keuangan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya, sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

- 2) Pengawasan menurut sifat

Menurut sifat, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu

tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

3) Pengawasan menurut metode

Menurut metode, pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui perlembagaan system pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan.

Menurut Mardiasmo (2014: 13), jenis-jenis pengawasan keuangan daerah yang menjamin akuntabilitas administrasi pemerintahan secara rutin dan usaha-usaha pembangunan sebagai berikut:

a) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dijalankan oleh pengawas terhadap bawahannya dalam unit kerjanya. Pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaannya atau gambaran tentang organisasinya adalah tanggung jawab pemimpin organisasi. Setiap pimpinan lembaga pemerintah atau unit kerja struktural dan fungsional seperti *project team*, komite, kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab. Sehingga jika mereka menemukan tindakan-tindakan yang menyimpang, mereka akan melakukan tindakan koreksi dan selalu mempertahankan *good performance*.

b) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang kewajiban utamanya adalah mengawasi seperti Unit Pengawasan Internal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Jendral Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c) Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

d) Pengawasan Hukum

Pengawasan hukum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). MA memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjalankan pengawasan atas pemerintah dalam bidang perundang-undangan.

e) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat disebut juga pengawasan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, pengawasan juga bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ormas), dan lain-lain. Tidak hanya pada tahapan evaluasi saja, pengawasan juga sangat diperlukan pada setiap tahapan yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD), dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam maupun dari luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penting dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Nopriansyah Putra <i>et. al</i> (2016) Universitas Sumatera Utara	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara	Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁) Akuntabilitas (X ₂) Transparansi (X ₃) Pengawasan (X ₄)	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Regresi Dengan Variabel Moderating	Sebagian pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara transparansi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. manajemen secara simultan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi memiliki

						pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2	Abdul Rohman (2009) Universitas Diponegoro	Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah.	Implementasi Sistem Akuntansi (X_1) Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2)	Fungsi Pengawasan (Y_1) Kinerja Pemerintah Daerah (Y_2)	<i>Path Analisis</i>	Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern.
3	Wawan Sukma Dan Lia Anggar Sari (2009) Universitas Siliwangi	Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Intern (X_1) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Regresi Linier Berganda	Bahwa pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat artinya pengawasan intern yang dilaksanakan efektif dan kontinue mempengaruhi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan akan lebih baik dan sebaliknya pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah diterapkan dengan baik pada

						prinsipnya mempengaruhi pengawasan intern, karena pengawasan intern yang dilaksanakan.
--	--	--	--	--	--	--

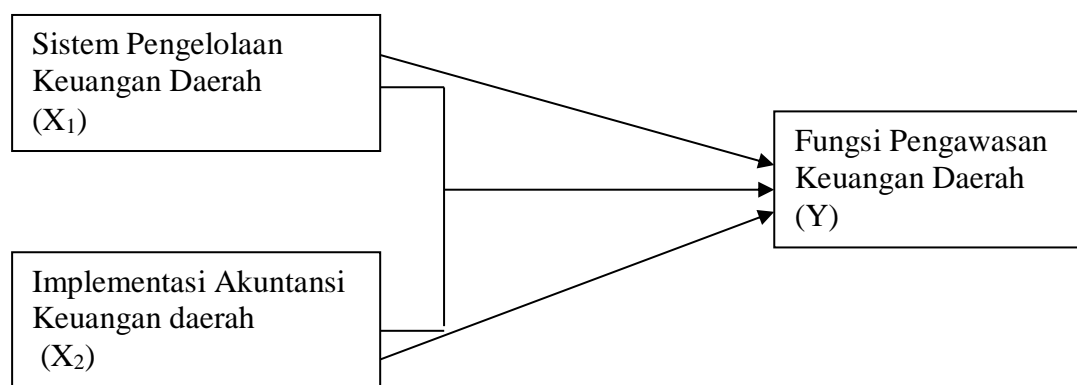
C. Kerangka Konseptual

Adapun penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Menurut *Generally Accepted Government Auditing Standard (GAGAS)* (2012: 6) menyatakan “Pengawasan atas anggaran dan operasi pemerintah dimaksudkan untuk menguji apakah pengelolaan keuangan pemerintah suatu daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan”. Pengawasan intern dimaksudkan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (2009: 24) menyatakan, “implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi dan memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada Pemda di Jawa Tengah”. Selain itu implementasi sistem akuntansi pemerintah, implementasi pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Terdapat dua dimensi yang menggambarkan implementasi akuntansi pemerintah. Kemudahan dan kemanfaatan implementasi sistem akuntansi pemerintah memungkinkan kebijakan akuntansi diterima semua pihak. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang

diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, karena sistem akuntansi memberikan landasan prosedur, teknik dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Menurut Jones dan Pendlebury (2012: 23) menyatakan, “Tidak adanya sistem akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan dan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan sehingga menyulitkan pemeriksaan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Rusiadi (2013: 79) menyatakan, “hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena harus dibuktikan kebenarannya”. Dari pengertian hipotesis tersebut, penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Langkat.
2. Implementasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Langkat.
3. Sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Langkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2013: 14), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jalan Khairul Anwar, Kwala Bingai, Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Juni 2018 sampai selesai, dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun														
		Juni, 2018			Juli, 2018			Januari, 2019			Maret, 2019			Juni, 2018		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■	■	■												
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■								
3	Perbaikan Acc Proposal					■	■	■	■							
4	Seminar Proposal								■	■						
5	Pengolahan Data									■	■	■	■			
6	Penyusunan Skripsi												■	■		
7	Bimbingan Skripsi														■	■
8	Meja Hijau															■

Sumber: Penulis (2018)

C. Populasi Dan Sampel/ Jenis Dan Sumber Data

1. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Arikunto (2010: 173) menyatakan, "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Sedangkan menurut Sugiyono (2010: 80) menyatakan, "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

b. Sampel

Penarikan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Menurut Arikunto (2010: 174) menyatakan, "Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.". Selanjutnya sugiyono (2010: 81), "Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sensus. Menurut Sugiyono (2012: 96) menyatakan, "Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus". Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat yang berjumlah sebanyak 45 orang/sampel.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data kuantitatif. Menurut sugiyono (2010: 15) menyatakan bahwa, “Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka/bilangan, yang pada proses penggunaan data tersebut dilakukan dengan pengukuran/perhitungan secara langsung.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui suatu pengamatan (observasi), wawancara, dan kuisisioner.
- 2) Data Sekunder adalah data pendukung dari data yang diperoleh melalui studi dokumentasi pada perusahaan yang diteliti dan studi pustaka melalui buku-buku manajemen yang berhubungan dengan penelitian.

D. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), variabel bebas kedua Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
1.	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)	Sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan segala aktivitas yang mencakup tahap penyusunan dan penempatan APBD. Sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aktivitas yang mencakup tahap perencanaan, tahap penyusunan dan penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD termasuk didalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap pertanggungjawaban, dan pengawasan. (Halim, 2012: 14).	a. Perencanaan b. Pengaturan Anggaran c. Kegiatan Implementasi Anggaran	Ordinal
2.	Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	Implementasi akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Hendriksen, 2012 :6)	a. Kemudahan b. Kemanfaatan	Ordinal
3.	Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	Fungsi pengawasan keuangan daerah adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan berkaitan dengan keuangan daerah. (Arfianti, 2011: 29).	a. Sistem akuntansi dan pengendalian intern b. Pengelolaan informal keuangan dan operasi pemerintah c. Evaluasi pengendalian internal d. Pengawasan Internal	Ordinal

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Angket (*questionnaire*), yaitu daftar pertanyaan/ Pernyataan yang diisi oleh responden sesuai dengan bentuk angket yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan skala likert.
2. Dokumentasi, yaitu sejarah singkat instansi, visi-misi instansi, struktur organisasi instansi dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Umar (2008: 166) menyatakan, “Validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Validitas ini akan menghasilkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran”. Menurut Sugiyono (2013: 257) menyatakan, “Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis pertanyaan, yaitu mengkorelasi skor tiap skor butir. Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, dengan membandingkan r -kritis = 0,30”. Jadi kalau korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika r_{xy} lebih besar dari r -tabel maka dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Umar (2008: 166), “Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada”. Butir kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioner reliabel atau tidak dengan menggunakan *alpha cronbach*. Menurut Sunyoto (2013: 110), “Kuesioner dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60”.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada.

Menurut Ghozali (2011: 201) menyatakan, “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel peengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas dengan kriteria:

- 1) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti terjadi Heterokedastisitas.
- 2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, berarti terjadi Homokedastisitas.

2. Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah yang dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS versi 23.00) dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (*Dependen Variable*)

X₁ = Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (*Independent Variable*)

X₂ = Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (*Independent Variable*)

- a = Konstanta
- b = Koefisien predictor
- e = Error

4. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

Menurut Sugiyono (2012: 59) menyatakan, “Uji kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*) bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dimaksud sebagai tuntutan dalam penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti adalah benar dan mencari jawaban sesungguhnya”.

a. Uji F

Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 : \beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh signifikan secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) $H_0 : \beta_1 : \beta_2 \neq 0$, ada pengaruh signifikan secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a) Terima H_0 (tolak H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha$ 5%
- b) Tolak H_0 (terima H_1), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{sig } F < \alpha$ 5%

Rumus Uji F adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - 1 - K)}$$

Keterangan:

- R^2 = Koefisien korelasi berganda dikuadratkan
- n = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel bebas

b. Uji t

Menurut Kuncoro (2013: 279) menyatakan, “Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstant”. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait dengan taraf signifikan 5%.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 : \beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) $H_0 : \beta_1 : \beta_2 = 0$, ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima.
- b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak (H_a diterima).

Menurut Umar (2008: 197), rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}} \text{ dengan } dk = n-2$$

Keterangan:

t = Uji pengaruh parsial

r = Koefisien Korelasi

n = Banyaknya data

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien

determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sejarah singkat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan pengaturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat memiliki peran dalam mengelola Keuangan dan aset daerah Kabupaten Langkat.

Kondisi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat dalam ruang lingkup pelayanan dapat dilihat dari struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) capaian indikator pelayanan daerah dan bentuk permasalahan yang ada saat ini.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Langkat yang telah disahkan oleh Bupati Langkat dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat 2007 pada tanggal 4 Desember 2007 yang diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Langkat pada tanggal 4 Desember 2007 Nomor 12 dan peraturan Bupati Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Langkat. Maka sejak tanggal 12 Juni 2008 tepatnya dengan dilantikannya pejabat eselon II pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten

Langkat berubah unit kerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat (BPKAD) yang beralamat di Jl. Khairul anwar Stabat.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Langkat kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Visi dan Misi

a. Visi

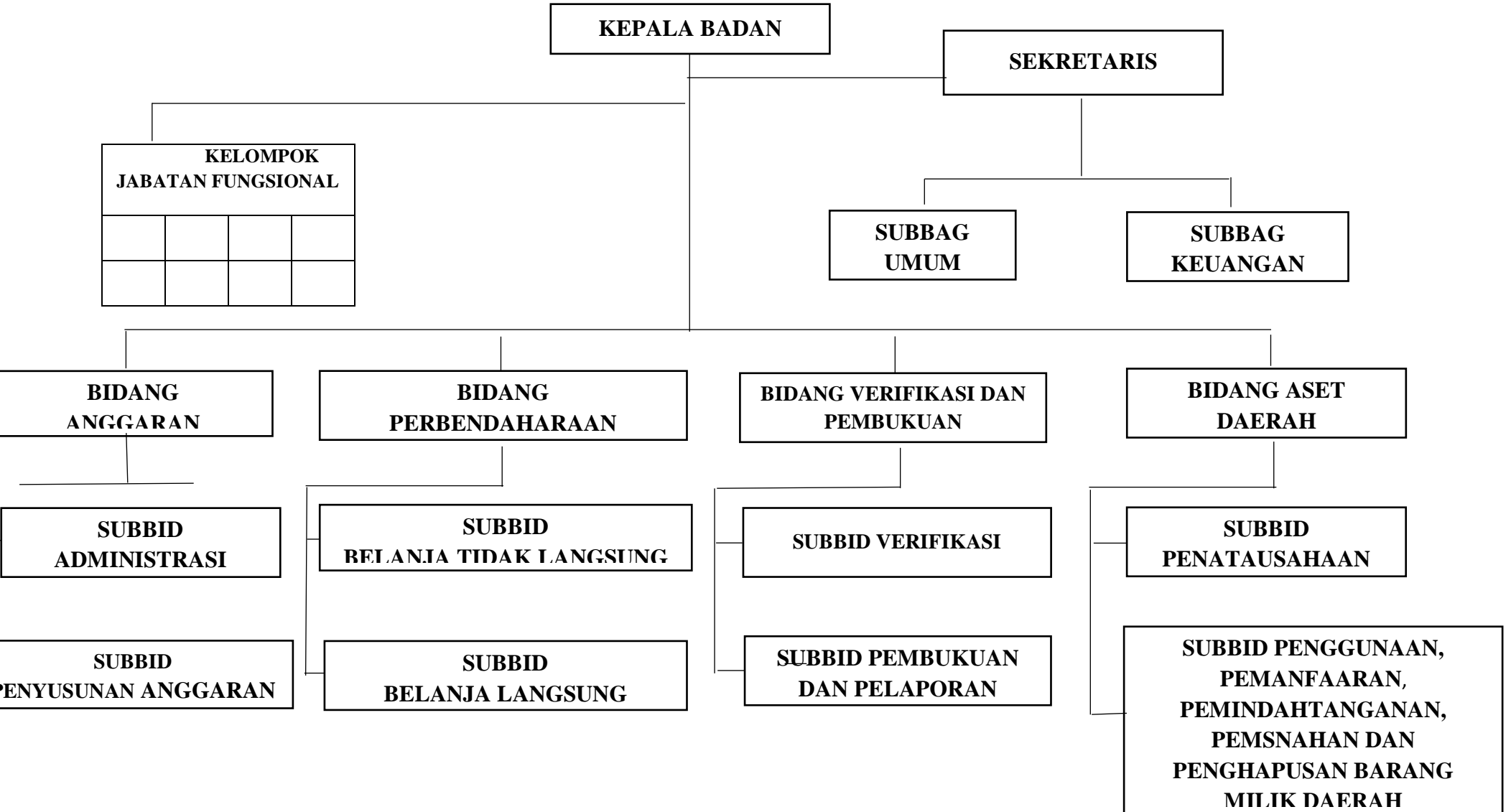
Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan sinergitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Membangun sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS

a. Struktur Organisasi



b. Pembagian Tugas

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi terdiri dari:

- 1) Kepala Badan. Bertugas memimpin mengkoordinasikan mengendalikan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 2) Sekretariat. Dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibidang teknis administrasi yang terkait dengan perencanaan penyelenggaraan dari pengkoordinasian urusan umum kepegawaian keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh kepala sub bagian umum dan kepala sub bagian keuangan dan beberapa orang staf.
- 3) Bidang Anggaran. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran administrasi penganggaran. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang anggaran dibantu oleh kepala sub bidang penyusunan anggaran dan kepala sub bidang administrasi anggaran.
- 4) Bidang Perbendaharaan. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menguji kebenaran

penagihan, membina ketatausahaan keuangan dan menyelesaikan masalah pembendaharaan. Kepala bidang perbendaharaan dalam melaksanakan tugasnya bertindak selaku kuasa bendahara umum daerah yang dibantu oleh kepala sub bidang belanja langsung dan kepala sub bidang belanja tidak langsung.

- 5) Bidang Verifikasi dan Pembukuan. Dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas membantu kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat. Dalam melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pembukuan pelaporan dan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan semester dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kepala bidang verifikasi dan pembukuan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala sub bidang verifikasi dan kepala sub bidang pembukuan pelaporan.
- 6) Bidang Aset. Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perbekalan, menyiapkan dan mengumpulkan bahan pengadaan perbekalan dan materil inventarisasi barang penyimpanan dan distribusi perbekalan dan materil, menyiapkan adminitrasi investasi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala sub bidang aset dibantu oleh kepala sub bidang inventarisasi aset daerah dan kepala sub bidang investasi dan pengelolaan kekayaan daerah.

**4. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Langkat**

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD).
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan serta penghapusan barang milik daerah.
- j. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

5. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem *Statistikal Package For The Social Sciens* (SPSS) versi 23.0, maka dapat diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

1) Uji Validitas Variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁), dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁)

Variabel	No. Butir	r_{hitung}	$r_{tabel} 5\%$	Status
		N = 45	Df = N = 45	
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)	1	0,861	0,2876	<i>Valid</i>
	2	0,848	0,2876	<i>Valid</i>
	3	0,782	0,2876	<i>Valid</i>
	4	0,804	0,2876	<i>Valid</i>
	5	0,743	0,2876	<i>Valid</i>

Sumber: SPSS 23.0 dan data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} *Product moment*, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 45$ yang menunjukkan angka 0,2876, dari tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan “*valid*”.

2) Uji Validitas Variabel Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X₂), dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Variabel	No. Butir	r_{hitung}	$r_{tabel5\%}$	Status
		N = 45	Df = N = 45	
Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	1	0,747	0,2876	<i>Valid</i>
	2	0,890	0,2876	<i>Valid</i>
	3	0,889	0,2876	<i>Valid</i>
	4	0,827	0,2876	<i>Valid</i>
	5	0,518	0,2876	<i>Valid</i>

Sumber: SPSS 23.0 dan data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} *Product moment*, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 45$ yang menunjukkan angka 0,2876, dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan “*valid*”.

3) Uji Validitas Variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Hasil dari pengolahan data pada variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y), dapat diperoleh hasil uji validitas yang terlihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah(Y)

Variabel	No. Butir	r_{hitung}	$r_{tabel}5\%$	Status
		N = 45	Df = N = 45	
Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	1	0,898	0,2876	<i>Valid</i>
	2	0,941	0,2876	<i>Valid</i>
	3	0,895	0,2876	<i>Valid</i>
	4	0,877	0,2876	<i>Valid</i>
	5	0,733	0,2876	<i>Valid</i>

Sumber: SPSS 23.0 dan data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat dilihat setiap butir dari setiap variabel secara keseluruhan menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} *Product moment*, pada taraf signifikan 5% (0,05) dan $df = 45$ yang menunjukkan angka 0,2876, dari perbandingan tersebut maka butir-butir pernyataan dari variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah dinyatakan “*valid*”.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Setelah instrumen-instrumen pada variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), dan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dinyatakan valid, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas (kehandalan) pada masing-masing variabel. Dari pengujian reliabilitas variabel-variabel tersebut, diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Reliabilitas Variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X₂), dan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Variabel	N=45		Rule of Thumb	Keputusan
	Jumlah Item Pertanyaan	Cronbach's Alpha		
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)	5	0,867	0,6	Reliabel
Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	5	0,831	0,6	Reliabel
Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	5	0,919	0,6	Reliabel

Sumber: SPSS 23.0 dan data primer diolah, 2019

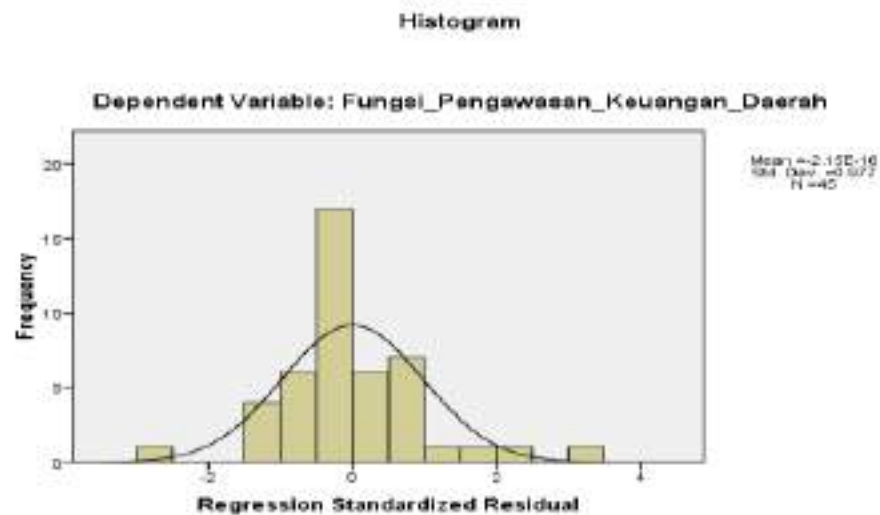
Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa seluruh instrumen berdasarkan analisis reliabilitas atas variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* untuk semua variabel adalah di atas 0,6, untuk itu seluruh variabel bisa dikatakan *realibel* (handal).

6. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian terhadap hipotesis dilakukan dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap beberapa uji asumsi klasik agar dapat dihasilkan satu kesimpulan data yang benar/layak dalam pembentukan model penelitian yang efektif yang terbebas dari pembiasan variabel. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas untuk menguji normalitas data secara statistik dengan menggunakan histogram, uji normal P-P Plot dan *Kolmogorof Smirnof*, uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*), uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Glejser*.

a. Uji Normalitas

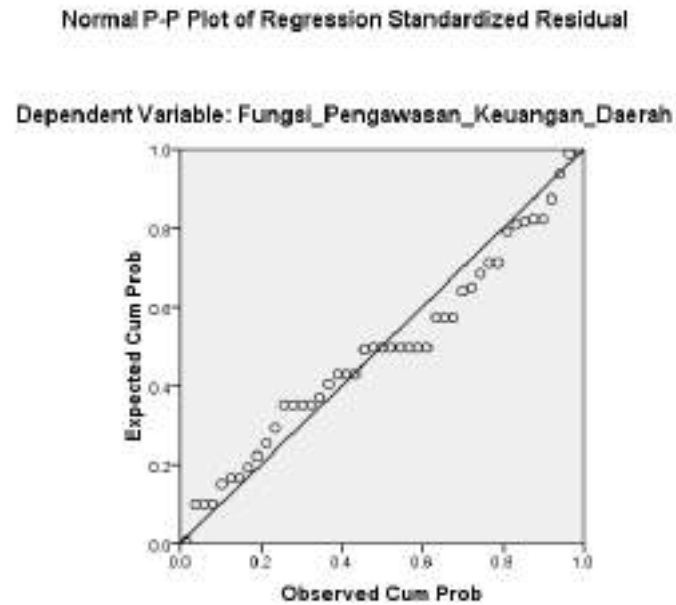
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini mempunyai distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan melihat Histogram, normal P-P Plot dan *Kolmogorov-Smirnov*. Jika titik-titik yang mewakili sampel dalam penelitian ini mendekati garis diagonal maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.



Gambar 4.1 Histogram

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa uji normalitas tampak pada data menyebar ke seluruh daerah normal. Daerah normal itu sendiri adalah daerah yang berada dibawah kurva tersebut yang bentuknya seperti lonceng terbalik.

Adapun pengujian normalitas dengan menggunakan normal P-P Plot pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Sumber : Data Sekunder (Diolah)

Gambar 4.2 Normal P-P Plot

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini memiliki penyebaran dan distribusi yang normal karena data memusat pada garis diagonal *Probability-Plot*. Maka dapat dikatakan bahwa distribusi data adalah normal. Uji normalitas juga didukung dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov*Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2019***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33540658
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.127
	Negative	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		.850
Asymp. Sig. (2-tailed)		.465

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2019

Pada hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* terlihat pada tabel 4.5 bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,465 > 0,05$), maka nilai residual tersebut adalah normal, dan pengujian hipotesis dapat dilakukan.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan linear yang sempurna atau yang pasti antara beberapa variabel independen. Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya, untuk mendeteksi ada

atau tidaknya multikolinearitasnya maka dapat dilihat dari nilai VIF (*Varian Inflation Factor*).

Pedoman suatu model regresi yang dikatakan bebas masalah multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10.

Hasil pengujian multikolinearitas antara variabel independen dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem_Pengelolaan_Keuangan_Daerah	.752	1.329
Implementasi_Akuntansi_Keuangan_Daerah	.752	1.329

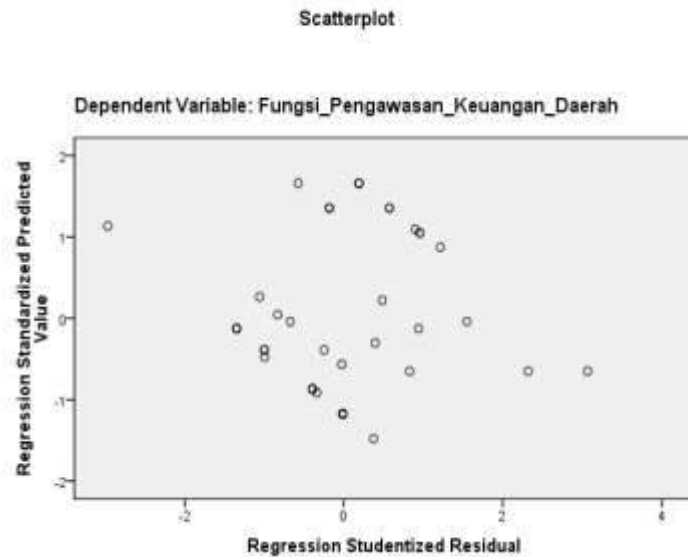
a. Dependent Variable: Fungsi_Pengawasan_Keuangan_Daerah

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan tidak ada yang memiliki tolerance value lebih kecil dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas. Nilai VIF untuk variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ($1,329 < 10$) dan nilai tolerance sebesar ($0,752 > 0,10$), nilai VIF untuk Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah ($1,329 < 10$) dan nilai tolerance sebesar ($0,752 > 0,10$). Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini lulus uji multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dalam fungsi regresi. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat uji Sactter Plot dan *Spearman Rho*. Gambar Scatter plot dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas

7. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat pada tabel hasil uji *coefficients*. Untuk mengetahui koefisien Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), dan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.076	2.597		.414	.681
Sistem_Pengelolaan_Keuangan_Daerah	.438	.117	.416	3.740	.001
Implementasi_Akuntansi_Keuangan_Daerah	.509	.117	.486	4.367	.000

a. Dependent Variable: Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 4.7 di atas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,076 + 0,438X_1 + 0,509 X_2$$

Interprestasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 1,076.
- Jika terjadi peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 1, maka Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,438.
- Jika terjadi peningkatan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 1, maka Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,093.

8. Uji Kesesuaian

a. Uji Hipotesis Secara Parsial (T)

Uji T dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai T hitung dalam tabel *coefficients* dengan T tabel. Jika T hitung $>$ T tabel maka hipotesis yang diajukan diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika T hitung $<$ T tabel maka hipotesis ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dan berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan di tolak atau dikatakan tidak signifikan.

Untuk mengetahui koefisien variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) maka dapat dilihat tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji T

Variabel Independen	T Hitung	T Tabel	Probabilitas	Signifikansi
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah(X_1)	3.740	1,68	0,05	0,001
Implemntasi Akuntansi Keuangan Daerah(X_2)	4.367	1,68	0,05	0,000

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai Beta pada regresi berganda menunjukkan adanya korelasi Positif antara variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah. Sehingga nilai T-tabel didistribusikan positif. Nilai T Hitung $3,740 > 1,68$ dan Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa **H1 diterima**, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah .

2) Pengaruh Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Nilai Beta pada regresi berganda menunjukkan adanya korelasi Positif antara Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah. Sehingga nilai T-tabel didistribusikan positif. Nilai T Hitung $4,367 > 1,68$ dan Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa **H2 diterima**, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah.

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Untuk menguji pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dalam tabel ANOVA

dengan F tabel. Jika F hitung $>$ F tabel maka hipotesis yang diajukan diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika F hitung $<$ F tabel maka hipotesis ditolak artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dan berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan di tolak atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.512	2	61.256	32.788	.000 ^a
	Residual	78.466	42	1.868		
	Total	200.978	44			

a. Predictors: (Constant), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan nilai alpha. Nilai signifikan sebesar $0,000 <$ dari nilai alpha sebesar 0,05 atau 5%.

Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika dilakukan pengujian secara simultan antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

Tabel 4.10 Uji Hipotesis

No	Variabel Penelitian	Hipotesis	Hasil	Hipotesis
1	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat	Berpengaruh positif dan signifikan secara parsial	Diterima
2	Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah	Implementasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat	Berpengaruh positif dan signifikan secara parsial	Diterima
3	Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah	Sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap fungsi pengawasan	Berpengaruh positif dan signifikan secara simultan	Diterima

		keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat		
--	--	---	--	--

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

9. Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2)) terhadap variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Y) dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel independen. Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Durbin-Watson
1	.781 ^a	.610	.591	2.370

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa angka *R Square* 0,610 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 61,0 %. Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat dapat diperoleh dan dijelaskan oleh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah.

Sedangkan sisanya $100\% - 61,0\% = 39,0\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model yang tidak diteliti.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai T Hitung $3,740 > 1,68$ dan Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat. Hal ini dapat disimpulkan jika Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat semakin baik, maka Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat akan semakin meningkat.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik. Hasil penelitian ini juga mendukung peneliti sebelumnya oleh Wawan (2009) yang menyatakan bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai T Hitung $4,367 > 1,68$ dan Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa variabel Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah. Hal ini dapat disimpulkan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat semakin baik, maka Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat akan semakin meningkat.

Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas karena akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat adalah badan yang memiliki tugas pokok mengelola keuangan dan sebagai pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan keuangan daerah guna pengawasan dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini mendukung peneliti

sebelumnya oleh Abadi (2009) yang menyimpulkan bahwa Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat pengujian ini dilakukan dengan metode cara membandingkan nilai signifikan dengan nilai alpha. Nilai signifikan sebesar 0,000 < dari nilai alpha 0,05 atau 5%.Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat semakin baik, maka Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat semakin meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Langkat semakin baik dan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari H1 diterima, yaitu pengujian secara parsial antara variabel Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian H2 diterima, yaitu pengujian secara parsial antara variabel Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat semakin baik dan Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga hasil dari pengujian secara simultan antara ketiga variabel adalah berpengaruh positif dan signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah dalam kondisi baik, sehingga pemerintah Kabupaten Langkat harus mampu mempertahankannya. Salah satu caranya adalah mengadakan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah secara menyeluruh sehingga dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan permasalahan yang akan muncul dapat dihindari dan pengelolaan serta pengimplementasian bisa terus ditingkatkan.
2. Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi, salah satu caranya adalah dengan dukungan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik. Sehingga disini para pegawai diharapkan akan mampu menguasai dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah serta mampu mengimplementasikan secara yang sudah tersusun secara matang dan lebih terperinci agar dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aituarauw, Ade Indah Wahyuni Achmad. 2012. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Pemerintah Kota Bandung.)* Bandung: Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Andiani, Novi. 2012. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Dan Aset Daerah (DPPKAD) Di Kabupaten Boyolali).* Surakarta: Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang).* Semarang: Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.* Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017).* Atlantis Press.
- Murti, Dian Indira. 2017. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Makassar.* Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar.

- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Kuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Lembaga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2007. *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rohman, Abdul, 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah)*. Surakarta: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 9, No. 1: 21-32. Februari.
- Rusiadi, et al. 2013. *Metode Penelitian, Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus Dan Aplikasi Spss, Eviews, Amos Dan Lisrel*. Medan: USU Press.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Setiawan, A., Rini, E. S., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 3. Analysis of Murabahah Financing Marketing Strategy at PT BPRS Amanah Insan Cita,

- Medan, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Science and Business*, 64-73.
- Soleh Chabib, Rochmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung: Fokus Media*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Tuasikal, Askam. 2009. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Ambon: Universitas Pattimura. *Jurnal Perbanas Institut*, Vol. 10, No.1 Juni. Hlm. 66-88.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Vanesa, Y. Y., Matondang, R., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 11. The Influence Of Organizational Culture, Work Environment And Work Motivation On Employee Discipline In PT Jasa Marga (Persero) TBK, Medan Branch, North Sumatra, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 37-45.
- Wakhyuni, E., Setiawan, A., Adnalin, A., Sari, D. S., Pane, D. N., Lestario, F., et al. (2018). ROLE OF FOREIGN CULTURE AND COMMUNITY IN PRESERVING CULTURAL RESILIENCE. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 508-516.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.